

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Strategi

Strategi berawal dari bahasa Yunani artinya umum. Oleh karena itu secara harfiah ialah seni dan umum. Kata ini mengarah kepada manajemen diorganisasi. Khususnya, strategi merupakan tempat adanya misi perusahaan, kekuatan eksternal dan internal dalam tujuan organisasi, adanya perumusan strategi dan kebijakan yang khusus untuk memastikan terlaksana tujuan dan mencapai tujuan (Zulfikar & Suriadi, 2020b). Menurut Ahmad A. Adnanputra yaitu pakar humas yang ada di naskah workshop berisi judul *PR Strategy*, menyampaikan didalam strategi merupakan dari bagian terpadu selanjutnya rencana dalam langkah-langkah sudah direncanakan yang diberi nama yaitu program kerja (Sari, 2012a). Sholes dan Johnson mendefinisikan strategi sebagai teknik yang menggunakan konfigurasi pada sumber daya jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pasar didalam sebuah proses (Nofriyandi & Epriadi, 2020b).

Menurut dari Pearce dan Robinson, strategi merupakan pencerminan kesadaran di perusahaan bagaimana, dimana, dan kapan dapat bersaing dengan lawan dengan tujuan dan maksud tidak pasti dalam suatu rencana yang dibuat perusahaan (Dwinugraha, 2020a).

Selanjutnya komponen pembentuk strategi dapat mempengaruhi unsur-unsur pada visi, tujuan, sasaran, kondisi maupun lingkungan yang membentuk pola budaya perusahaan tersebut

Sumber daya manusia, dipergunakan, *planning* dan program jangka panjang atau pendek, tujuan maupun sasaran ingin dicapai, dan sistem organisasi yang bergantung dari misi perusahaan (Sari, 2012b).

Dengan demikian rencana strategis adalah sebuah konsep perencanaan tergantung pada misi perusahaan bisa digunakan pada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang bersifat strategis dan baik diterapkan dalam mengembangkan kegiatan bisnis dan untuk mendorong proses instansi pemerintah baik swasta maupun pemerintah ditingkat pusat maupun daerah

2.2 Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal fishing adalah suatu aktifitas penangkapan ikan yang tidak ada di peraturan yang berlaku, kegiatan perikanan tidak sah, aktifitas kapal yang tidak dilaporkan kepada lembaga atau institusi perikanan yang berwenang (Putri, 2017a). bisa terdapat di perikanan tangkap yang melakukan kegiatan itu tergantung alat tangkap, target spesiesnya, lokasi yang tidak ada ijin, dan eksploitasi disemua tipe perikanan dalam ukuran kecil maupun industri besar, perikanan zona yurisdiksi internasional dan nasional (Sartono, Prakoso and Sianturi, 2019).

Ada empat golongan pengertian *illegal fishing* yang umum di Indonesia (Putri, 2015) ,yaitu:

1. Menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang merusak.
2. Menangkap ikan tanpa izin dengan yang berwenang.

3. Menangkap ikan menggunakan izin yang tidak resmi/palsu.
4. Menangkap ikan tidak sesuai ijin yang berlaku.

Selanjutnya, Wilayah laut yang luas dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, karena laut menjadi sumber utama perikanan dengan melakukan tangkapan ikan, maka dari itu Penangkapan ikan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang sudah ditentukan. Penegakan hukum dan pengawasan juga penting dilakukan Pemerintah Daerah melalui Aparatur Daerahnya, sehingga adanya kerjasama/koordinasi Para Penyidik atau Penegak Hukum dengan Aparatur Daerah dalam memberi efek jera terhadap pelanggar hukum di laut. (Adwani & Sulaiman, 2020b)

Rusaknya ekosistem laut Indonesia mengakibatkan Indonesia merugi sampai triliunan rupiah, maka dari itu diangkatnya Permasalahan *illegal fishing* (Almuzzamil, 2017b) :

1. Dampak kerugian pada sektor ekonomi di suatu Negara, terutama Negara maritim ditimbulkan oleh permasalahan *illegal fishing*.
2. Dampak kerugiannya juga pada sector lingkungan, sosial, dan politik di suatu Negara.
3. *Illegal fishing* yang terjadi di suatu negara, terutama wilayah kedaulatan karena peraturan internasional yang kurang jelas.
4. Penanganan kasus *illegal fishing* satu negara dan lainnya yang berbeda yang mengakibatkan ketegangan politis didalam Negara yang berhubungan.

2.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan unsur penentu pembangunan dari suatu insitusi yang teratur dan teknik indentifikasi dari berbagai faktor. Tujuan dari analisis SWOT untuk perumusan strategi dari pembangunan institusi maupun potensi institusi tersebut bisa juga dilakukan evaluasi suatu kegiatan. Dinas dan instansi pemerintah yang merupakan penerapan di institusi baik internal dan eksternal dalam menggapai misi maupun visi yang ditentukan dari *stakeholder*. (sjafrizal, 2014)

Selanjutnya analisis SWOT ada empat singkatan yaitu sebagai berikut *strength* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threat* (ancaman). Unsur yang empat ini merupakan bagian yang penting dan penting dibahas untuk mengetahui masalah dan kondisi yang terjadi di daerah/institusi tertentu. Berikut penjelasannya (sjafrizal, 2014):

1. Kekuatan (*strength*) adalah insitusi ataupun daerah yang mempunyai kelebihan. Potensi sumber daya alam yang besar dan bernilai bagus, pendidikan lebih bagus, keuangan baik, kesuburan tanah dan lainnya dalam analisis sosial ekonomi yang memiliki kelebihan.
2. Kelemahan (*weaknesses*) merupakan institusi ataupun daerah yang mempunyai kekurangan. Rendah kesuburan tanah, pendidikan buruk, keuangan buruk, sumber daya alam yang sedikit dan lainnya dalam analisis sosial ekonomi yang kekurangan.

3. Peluang (*opportunities*) merupakan institusi ataupun daerah yang mempunyai kesempatan. Kebijakan, aturan pemerintah, segi ekonomi, unsur luar, ataupun teknologi yang baru di dalam peluang.

4. Ancaman (*threat*) merupakan institusi ataupun daerah yang mempunyai tantangan. Perubahan kebijakan, kondisi sosial ekonomi yang berubah, pandangan yang berubah, teknologi yang maju/keamanan dan ketertiban yang berbahaya di pembangunan.

Selanjutnya analisis SWOT ini merupakan suatu rumusan strategi dalam organisasi dengan bermacam faktor secara teratur pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sebagai berikut (Nur'Aini Fajar, 2020) :

1. Kekuatan merupakan sumber daya lebih yang dimiliki organisasi dalam suatu instansi yang bisa di kendalikan.
2. Kelemahan adalah sumber daya baik di instansi/organisasi.
3. Ancaman adalah tantangan dari luar yang buruk.
4. Matriks SWOT adalah sebuah tabel yang menggambarkan strategi di internal dan eksternal yang berisi analisis SWOT.
5. IFAS (*internal strategic factors analysis summary*) merupakan strategi internal yang berisi kelemahan dan kekuatan.
6. EFAS (*external strategic factors analysis summary*) adalah strategi eksternal yang berisi ancaman dan peluang.
7. Strategi SO yaitu strategi yang menggunakan unsur kekuatan untuk merebut peluang yang sudah ada.

8. Strategi WO yaitu hubungan strategi pada unsur kelemahan dengan peluang yang tersedia.
9. Strategi ST yaitu strategi dengan memanfaatkan kelebihan yang ada dalam mengurangi ancaman dari luar.
10. Strategi WT yaitu strategi dengan mengaitkan kekurangan dengan ancaman untuk mengatasi kelemahan internal dan untuk mengurangi ancaman dari luar.

2.2. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh T. Muhammad Almuzzamil yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam menanggulangi *illegal fishing* pada tahun 2014-2015. Penelitian ini dipublikasikan oleh JOM FISIP, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah harus menangani secara serius untuk mengatasinya. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi *illegal fishing*, dengan adanya kekuatan Undang-Undang yang telah di revisi dalam penangkapan ikan secara legal dan adanya kekuatan hukum pada pelaku *illegal fishing* dan dilakukan peningkatan sumber daya manusia dalam suatu kegiatan dengan adanya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang tinggal di dekat pantai (Almuzzamil, 2017a).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Winarti yang berjudul *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau: “Aset Bersama” Negara-Negara Sekitar. Penelitian ini

dipublikasikan Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa pada sektor ekonomi maupun lingkungannya berkembang menjadi sekuriti dalam Negara, lingkungan, yang terancam karena bahan berbahaya yang ditaruh di laut, *trawl*, bius dalam kegiatan penangkapan ikan tidak sah yang terus berkembang jika stakeholder tidak terlibat dalam menangani *illegal fishing*. Sehingga adanya pemberdayaan para aktor non Negara seperti dikatakan oleh Barry Buzan sebagai *securing actors* supaya terjaganya sumber daya di Kepri (Winarti, 2017b).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Zukmadianty Putri yang berjudul Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Oleh Nelayan Asing di Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2015. Penelitian ini dipublikasikan JOM FISIP, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2017. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan penangkapan ikan *illegal* di Kabupaten Anambas setiap tahunnya tepat sasaran, namun setiap tahun pelanggaran bertambah. Ini dikarenakan kerjasama maupun kinerja tim gabungan operasional masih kurang optimal. Selain itu juga adanya kepentingan tumpang tindih antara tim operasional gabungan yang menyebabkan kurang baiknya komunikasi tim gabungan pengawasan sehingga juga

menghambat kelancaran pengawasan dan pemberantasan penangkapan ikan *illegal* di laut Anambas (Putri, 2017b).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sartono, Lukman Yudhi Prakoso, Dohar Sianturi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan *Illegal Fishing* Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut. Penelitian ini dipublikasikan Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan Maritim dan pertahanan Indonesia bisa terancam karena adanya kejahatan dan *illegal fishing*. Maraknya kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* mengenai perikanan yang berisi orang maupun badan hukum asing masuk ke wilayah ZEE Indonesia dengan penangkapan ikan dalam hukum internasional dan nasional yang telah ditentukan dalam UU No 31 Tahun 2004 (Sartono, Prakoso, & Sianturi, 2019a).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nofriyandi dan Dedi Epriadi yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Batam. Penelitian tersebut dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, ISSN 2714-593X. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengacu pada konsep indikator strategi dan pengembangan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi salah satu SKPD (satuan kerja

perangkat daerah) dalam menyelesaikan serta mensukseskan pembangunan yang ada di kota Batam diperlukan Peran Andil Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Batam dan Strategi Dinas Koperasi harus adanya pembaharuan dalam analisis SWOT (Nofriyandi & Epriadi, 2020a).

6. Penelitian yang dilakukan Zulfikar dan Mimin Suriadi yang berjudul Strategi Dinas Perindustrian dan Kerjasama Kabupaten Pidea Jaya Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. Penelitian tersebut dipublikasikan di *BIRC-Journal*. Volume 3, Nomor 3, Tahun 2020, ISSN online 2615-3076. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa pemerintah sangat mendukung UMKM masyarakat, namun dari segi permodalan mengharapkan pemerintah mengalokasikan anggaran dalam modal atau bahan baku dan mesin yang mahal (Zulfikar & Suriadi, 2020a).
7. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Pandu Dwinugraha yang berjudul Strategi Pengembangan Pendidikan Taman Kanak-Kanak. Penelitian tersebut dipublikasikan oleh P-JIAP, *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021, ISSN online 2541-2035. Penelitian menggunakan jenis penelitian kombinasi dengan metode survey dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian berdasarkan indikator internal dan eksternal. Pada faktor internal, penyelenggaraan secara tidak langsung dengan ada keunggulan dan kelemahan dan terdapat tiga strategi dalam mengatasi persoalan

pengembangan lembaga TK kota Blitar yaitu pendampingan dalam anggaran dan pengawasan dana BOP, peningkatan hubungan kerjasama lembaga TK melalui skema sponsorship, dan standarisasi sarana dan prasarana dalam menekan ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga TK kota Blitar (Dwinugraha, 2020b).

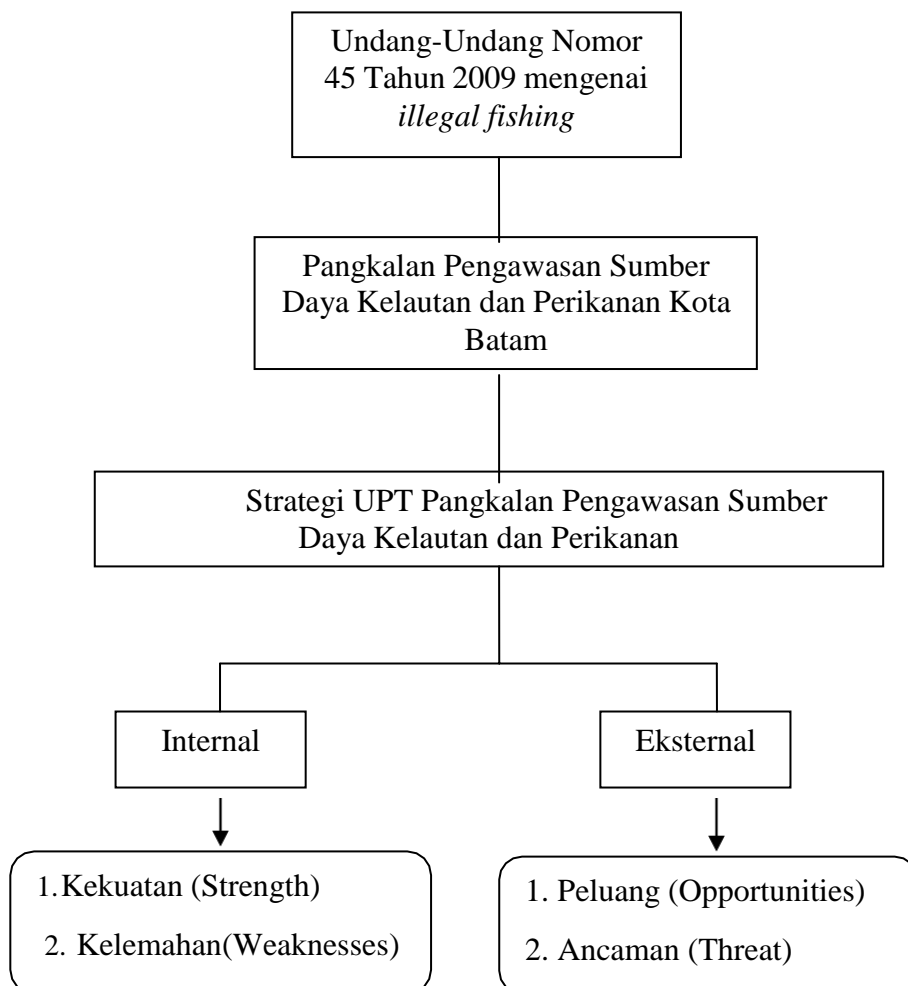
8. Penelitian yang dilakukan Adwani dan Sulaiman yang berjudul Peningkatan Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan *Illegal Fishing* di Aceh. Penelitian tersebut dipublikasikan Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 22, Nomor 3, Tahun 2020, ISSN online 2527-8482. Penelitian menggunakan metode sosio legal, yang didalamnya dipengaruhi oleh beragam faktor. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi atau peran dari penegak hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Air, Penyidik PPNS, Penyidik TNI AL belum berperan baik sehingga penangkapan ikan bisa terselesaikan secara tuntas karena masih terjadi penangkapan ikan secara *illegal*. Dalam penegakan hukum koordinasi antar penyidik sangat perlu sehingga para pelanggar bisa di tuntutan dan diproses dalam penyelesaian perkara siding (Adwani & Sulaiman, 2020a).

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran, kerangka pemikiran merupakan model konseptual mengenai keterkaitan teori yang saling berhubungan dan dengan berbagai macam penyebab yang sudah diidentifikasi dalam persoalan yang mendesak. (Pasalong, 2020).

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran

(sumber: Data Peneliti, 2021b)





Universitas Putera Batam